



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2498 K/84/MEM/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN  
DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
UNTUK TAHUN 2009**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2381);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri teknis dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2008;

MEMUTUSKAN :

) Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2009.

KESATU

Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Tahun 2009 untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

- a. Sektor Pertambangan Umum tahun 2009 sejumlah 1 (satu) Provinsi, 206 (dua ratus enam) Kabupaten dan 15 (lima belas) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- b. Sektor Pertambangan Minyak Bumi tahun 2009 sejumlah 6 (enam) Provinsi, 54 (lima puluh empat) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- c. Sektor Pertambangan Gas Bumi tahun 2009 sejumlah 4 (empat) Provinsi, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

) KEDUA

Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam sektor Pertambangan Umum adalah :
  1. Prakiraan penerimaan dari luran Tetap/Landrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
  2. Prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.
- b. Sumber daya alam sektor minyak bumi dan gas bumi :

Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil minyak bumi dan gas bumi adalah *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan PT Pertamina EP sendiri, kegiatan Kontrak *Production Sharing* dan/atau kegiatan Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah yang bersangkutan.

KETIGA - Penetapan Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Sektor Pertambangan Umum :

1. daerah penghasil luran Tetap (*Landrent*) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara;
2. daerah penghasil Royalty adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

b. Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :

Daerah penghasil adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT ) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2008

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2498 K/84/MEM/2008  
 TANGAL : 30 Oktober 2008

DAERAH PENGHASIL DAN  
 DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
 SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM TAHUN 2009

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
I	<b>Nanggroe Aceh Darussalam</b>		0	1.132.911.900	1.132.911.900
1	Kab. Aceh Tengah	KP	0	704.761.200	704.761.200
2	Kab. Aceh Barat	KP, KK	0	114.408.400	114.408.400
3	Kab. Pidie	KP, KK	0	103.757.000	103.757.000
4	Kab. Nagan Raya	KP	0	49.650.000	49.650.000
5	Kab. Aceh Timur	KP	0	40.000.000	40.000.000
6	Kab. Aceh Selatan	KP	0	24.800.000	24.800.000
7	Kab. Aceh Barat Daya	KP	0	23.607.600	23.607.600
8	Kab. Aceh Singkil	KP, KK	0	22.929.600	22.929.600
9	Kab. Aceh Tamiang	KP	0	18.582.000	18.592.000
10	Kab. Aceh Besar	KP	0	18.499.000	18.499.000
11	Kab. Aceh Jaya	KP	0	11.328.600	11.328.600
12	Kota Subulussalam	KP	0	578.500	578.500
II	<b>Sumatera Utara</b>		0	1.611.777.900	1.611.777.900
1	Kab. Tapanuli Selatan	KK	0	513.771.100	513.771.100
2	Kab. Mandailing Natal	KP, KK	0	457.790.900	457.790.900
3	Kab. Tapanuli Tengah	KK	0	247.126.000	247.126.000
4	Kab. Dairi	KK	0	123.412.600	123.412.600
5	Kab. Tapanuli Utara	KK	0	111.672.000	111.672.000
6	Kota Padang Sidempuan	KK	0	93.295.000	93.295.000
7	Kab. Pakpak Bharat	KP	0	33.977.800	33.977.800
8	Kab. Humbang Hasundutan	KP	0	22.517.500	22.517.500
9	Kab. Nias	KP	0	8.215.000	8.215.000
III	<b>Sumatera Barat</b>		19.300.000.000	731.059.615	20.031.059.615
1	Kota Sawahlunto	KP	18.500.000.000	386.207.500	18.886.207.500
2	Kab. Sijunjung	KP	800.000.000	90.020.175	890.020.175
3	Kab. Pasaman	KP	0	118.522.200	118.522.200
4	Kab. Pesisir Selatan	KP	0	43.312.500	43.312.500
5	Kab. Solok	KP	0	37.291.480	37.291.480
6	Kab. Solok Selatan	KP	0	22.380.000	22.380.000
7	Kab. Lima Puluh Kota	KP	0	17.575.600	17.575.600
8	Kab. Dharmasraya	KP	0	9.336.160	9.336.160
9	Kab. Agam	KP	0	6.414.000	6.414.000
IV	<b>Riau</b>		38.096.000.000	2.076.753.900	40.172.753.900
1	Kab. Indragiri Hulu	KP	30.636.000.000	1.058.969.500	31.694.969.500
2	Kab. Kuantan Singingi	KP	6.500.000.000	228.113.400	6.728.113.400
3	Kab. Siak	KP	960.000.000	25.025.000	985.025.000
4	Kab. Indragiri Hilir	KP	0	336.390.000	336.390.000
5	Kab. Kampar	KP	0	275.889.000	275.889.000
6	Kab. Bengkalis	KP	0	85.642.000	85.642.000
7	Kab. Petalawan	KP	0	58.725.000	58.725.000
8	Kab. Rokan Hulu	KP	0	8.000.000	8.000.000

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>V</b>	<b>Kepulauan Riau</b>		<b>184.757.000.000</b>	<b>1.573.015.110</b>	<b>186.330.015.110</b>
1	Kab. Bintan	KP	78.255.000.000	366.771.000	78.621.771.000
2	Kota Tanjung Pinang	KP	59.220.000.000	54.504.660	59.274.504.660
3	Kab. Karimun	KP, KK	27.848.440.000	428.136.450	28.276.576.450
4	Kab. Lingga	KP	3.923.560.000	153.150.000	4.076.710.000
5	Kab. Natuna	KP	0	1.250.000	1.250.000
6	Pemprov Kepulauan Riau	KP	15.510.000.000	569.203.000	16.079.203.000
<b>VI</b>	<b>Jambi</b>		<b>21.534.000.000</b>	<b>1.021.549.700</b>	<b>22.555.549.700</b>
1	Kab. Bungo	KP, PKP2B	17.534.000.000	131.355.200	17.665.355.200
2	Kab. Batang Hari	KP, PKP2B	3.200.000.000	277.069.500	3.477.069.500
3	Kab. Sarolangun	KP, PKP2B	800.000.000	219.911.400	1.019.911.400
4	Kab. Merangin	KP	0	240.960.000	240.960.000
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	KP	0	57.313.000	57.313.000
6	Kab. Muaro Jambi	KP	0	52.065.600	52.065.600
7	Kab. Tebo	KP	0	42.875.000	42.875.000
<b>VII</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>404.500.000.000</b>	<b>5.929.963.609</b>	<b>410.429.963.609</b>
1	Kab. Muara Enim	KP, PKP2B	287.000.000.000	1.868.551.100	288.868.551.100
2	Kab. Lahat	KP, PKP2B	117.500.000.000	571.473.250	118.071.473.250
3	Kab. Musi Banyuasin	KP, PKP2B	0	2.036.586.209	2.036.586.209
4	Kab. Banyuasin	KP, PKP2B	0	538.818.750	538.818.750
5	Kab. Musi Rawas	KP, KK, PKP2B	0	470.829.300	470.829.300
6	Kab. Ogan Komering Ulu	KP, PKP2B	0	315.055.500	315.055.500
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	KP, PKP2B	0	67.059.500	67.059.500
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	KP	0	35.060.000	35.060.000
9	Kota Prabumulih	KP	0	26.530.000	26.530.000
<b>VIII</b>	<b>Kep. Bangka Belitung</b>		<b>398.304.000.000</b>	<b>12.376.341.650</b>	<b>410.680.341.650</b>
1	Kab. Bangka Induk	KP	113.489.600.000	3.578.301.670	123.067.901.670
2	Kab. Bangka Selatan	KP, KK	96.261.200.000	2.498.166.000	98.759.366.000
3	Kab. Bangka Barat	KP	75.158.200.000	2.178.712.500	77.336.912.500
4	Kab. Bangka Tengah	KP, KK	42.770.000.000	1.867.432.230	44.637.432.230
5	Kab. Belitung Timur	KP	33.605.000.000	1.637.938.500	35.242.938.500
6	Kab. Belitung Induk	KP	31.020.000.000	495.840.750	31.515.840.750
7	Kota Pangkal Pinang	KP	0	119.950.000	119.950.000
<b>IX</b>	<b>Bengkulu</b>		<b>10.800.000.000</b>	<b>883.377.830</b>	<b>11.683.377.830</b>
1	Kab. Bengkulu Utara	KP	6.000.000.000	571.222.750	6.571.222.750
2	Kab. Seluma	KP	4.800.000.000	183.714.220	4.983.714.220
3	Kab. Mukomuko	KP	0	68.472.500	68.472.500
4	Kab. Lebong	KP	0	24.740.000	24.740.000
5	Kab. Bengkulu Selatan	SIPP	0	18.746.340	18.746.340
6	Kab. Kaur	SIPP	0	11.282.020	11.282.020
7	Kab. Kepahiang	KP	0	5.200.000	5.200.000
<b>X</b>	<b>Lampung</b>		<b>78.750.000</b>	<b>418.552.100</b>	<b>497.302.100</b>
1	Kab. Tanggamus	KP, KK	22.500.000	353.210.800	375.710.800
2	Kab. Lampung Selatan	KP	56.250.000	18.347.500	74.597.500
3	Kab. Lampung Barat	KK	0	41.172.000	41.172.000
4	Kab. Way Kana:	KP, PKP2B	0	4.832.000	4.832.000
5	Kab. Pesawaran	KP	0	990.000	990.000

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Penguasaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>XI</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>26.094.734.700</b>	<b>569.852.300</b>	<b>26.664.587.000</b>
1	Kab. Bogor	KP	26.091.584.700	305.948.620	26.397.533.320
2	Kab. Sukabumi	KP	1.800.000	121.561.910	123.361.910
3	Kab. Cianjur	KP	0	61.406.000	61.406.000
4	Kab. Garut	KP	0	41.991.200	41.991.200
5	Kab. Bandung Barat	KP	0	29.316.320	29.316.320
6	Kab. Tasikmalaya	KP	0	7.078.250	7.078.250
7	Kab. Purwakarta	KP	1.350.000	2.550.000	3.900.000
<b>XII</b>	<b>Banten</b>		<b>661.047.001</b>	<b>140.483.920</b>	<b>801.530.921</b>
1	Kab. Lebak	KP	661.047.001	137.803.920	798.850.921
2	Kab. Pandeglang	KP	0	2.680.000	2.680.000
<b>XIII</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>387.750.000</b>	<b>80.851.500</b>	<b>468.601.500</b>
1	Kab. Purworejo	KP	246.750.000	56.807.500	303.557.500
2	Kab. Cilacap	KP	141.000.000	6.408.000	147.408.000
3	Kab. Pekalongar.	KP	0	11.236.000	11.236.000
4	Kab. Wonogiri	KP	0	6.400.000	6.400.000
<b>XIV</b>	<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>		<b>0</b>	<b>44.083.620</b>	<b>44.083.620</b>
1	Kab. Kulonprogo	KP	0	44.083.620	44.083.620
<b>XV</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>707.850.000</b>	<b>331.745.650</b>	<b>1.039.595.650</b>
1	Kab. Jon bang	KP	472.500.000	25.501.750	498.001.750
2	Kab. Pasuruan	KP	136.500.000	36.619.000	173.119.000
3	Kab. Trenggalek	KP	30.600.000	95.260.000	125.860.000
4	Kab. Jember	KP	0	90.423.900	90.423.900
5	Kab. Banyuwangi	KP	68.250.000	688.000	68.938.000
6	Kab. Pacitan	KP	0	29.280.000	29.280.000
7	Kab. Madiun	KP	0	21.747.000	21.747.000
8	Kab. Ponorogo	KP	0	19.636.000	19.636.000
9	Kab. Lumajang	KP	0	12.610.000	12.610.000
<b>XVI</b>	<b>Kalimantan Barat</b>		<b>133.300.000.000</b>	<b>4.149.991.300</b>	<b>137.449.991.300</b>
1	Kab. Ketapang	KP	126.562.500.000	1.712.105.000	128.274.605.000
2	Kab. Sanggau	KP	6.400.000.000	571.745.400	6.971.745.400
3	Kab. Kapuas Hulu	KP	337.500.000	981.554.500	1.319.054.500
4	Kab. Sintang	KP, KK, PKP2B	0	290.930.000	290.930.000
5	Kab. Melawi	KP	0	153.500.000	153.500.000
6	Kab. Landak	KP	0	117.472.000	117.472.000
7	Kab. Kubu Raya	KP	0	102.868.000	102.868.000
8	Kab. Sambas	KP	0	73.080.250	73.080.250
9	Kab. Sekadau	KP	0	72.259.000	72.259.000
10	Kab. Bengkayang	KP	0	68.477.150	68.477.150
11	Kab. Pontianak	KP	0	6.000.000	6.000.000

7

No.	Propinsi/Kab/Jkota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>XVII</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>126.390.700.000</b>	<b>7.759.263.880</b>	<b>134.149.963.880</b>
1	Kab. Murung Raya	KP, KK, PKP2B	88.505.700.000	3.727.053.800	92.232.753.800
2	Kab. Barito Utara	KP, PKP2B	10.800.000.000	1.413.785.400	12.213.785.400
3	Kab. Kotawaringin Timur	KP	10.665.000.000	135.106.100	10.800.106.100
4	Kab. Barito Timur	KP, PKP2B	6.400.000.000	472.234.300	6.872.234.300
5	Kab. Barito Selatan	KP, PKP2B	4.800.000.000	589.789.280	5.389.789.280
6	Kab. Kotawaringin Barat	KP, KK	4.050.000.000	50.508.700	4.100.508.700
7	Kota Palangka Raya	KP	900.000.000	93.087.600	993.087.600
8	Kab. Kalangan	KP, KK	270.000.000	369.581.700	639.581.700
9	Kab. Gunung Mas	KP, KK	0	466.513.390	466.513.390
10	Kab. Kapuas	KP, KK, PKP2B	0	288.610.410	288.610.410
11	Kab. Seruyan	KP, KK	0	119.629.200	119.629.200
12	Kab. Lamar dau	KP	0	93.364.000	93.364.000
<b>XVIII</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>1.497.811.043.000</b>	<b>9.445.189.724</b>	<b>1.507.256.232.724</b>
1	Kab. Kotabaru	KP, KK, PKP2B	322.022.800.000	2.796.971.990	324.819.771.990
2	Kab. Tabalong	KP, PKP2B	304.005.748.148	781.573.350	304.787.321.498
3	Kab. Baangan	KP, PKP2B	285.905.616.452	549.639.996	286.455.256.448
4	Kab. Tanah Bumbu	KP, KK, PKP2B	237.084.400.000	1.783.409.228	238.867.809.228
5	Kab. Banjar	KP, KK, PKP2B	153.969.600.000	965.934.830	154.935.534.830
6	Kab. Tanah Liat	KP, KK, PKP2B	99.843.200.000	1.152.056.380	100.995.256.380
7	Kab. Tapin	KP, PKP2B	61.166.878.400	579.943.600	61.746.822.000
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	KP, PKP2B	28.172.800.000	438.472.750	28.611.272.750
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	5.640.000.000	270.738.800	5.910.738.800
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	PKP2B	0	126.448.800	126.448.800
<b>XIX</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>3.611.331.750.000</b>	<b>13.749.870.552</b>	<b>3.625.081.620.552</b>
1	Kab. Kutai Timur	KP, PKP2B	1.735.992.000.000	2.439.603.470	1.738.431.603.470
2	Kab. Kutai Kartanegara	KP, PKP2B	618.818.300.000	4.809.489.181	623.627.789.181
3	Kab. Paser	KP, PKP2B	402.597.000.000	911.943.361	403.508.943.361
4	Kab. Kutai Barat	KP, KK, PKP2B	322.420.000.000	2.300.160.200	324.720.160.200
5	Kab. Berau	KP, PKP2B	296.899.000.000	1.254.630.850	298.153.630.850
6	Kab. Nunukan	KP, PKP2B	129.865.000.000	461.011.000	130.326.011.000
7	Kota Samarinda	KP, PKP2B	92.700.450.000	419.977.190	93.120.427.190
8	Kab. Penajam Paser Utara	KP	6.400.000.000	497.738.700	6.897.738.700
9	Kab. Malinau	KP	5.640.000.000	92.177.500	5.732.177.500
10	Kab. Bulungan	KP, PKP2B	0	533.989.700	533.989.700
11	Kota Bontang	PKP2B	0	29.149.400	29.149.400
<b>XX</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>		<b>91.606.290.000</b>	<b>3.011.871.495</b>	<b>94.618.161.495</b>
1	Kab. Sumbawa Barat	KP, KK	91.606.290.000	1.465.906.000	93.072.196.000
2	Kab. Sumbawa	KP, KK	0	1.138.978.000	1.138.978.000
3	Kab. Bima	KP, KK	0	206.613.495	206.613.495
4	Kab. Dompu	KP, KK	0	140.800.000	140.800.000
5	Kota Bima	KP	0	50.000.000	50.000.000
6	Kab. Lombok Tengah	KP	0	6.174.000	6.174.000
7	Kab. Lombok Barat	KP	0	3.400.000	3.400.000

7

No.	Propinsi/Kab/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>XXI</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>				
1	Kab. Manggarai	KP	341.250.000	56.160.500	397.410.500
2	Kab. Manggarai Barat	KP	341.250.000	42.403.000	383.653.000
3	Kab. Timor Tengah Selatan	KP	0	4.932.500	4.932.500
4	Kab. Alor	KP	0	4.700.000	4.700.000
			0	4.125.000	4.125.000
<b>XXII</b>	<b>Sulawesi Utara</b>				
1	Kab. Bolaang Mongondow	KP, KK	2.012.822.000	1.794.074.360	3.806.896.360
2	Kab. Minahasa Utara	KP, KK	2.012.822.000	1.644.905.000	3.657.727.000
3	Kab. Bolaang Mongondow Utara	KK	0	111.160.225	111.160.225
4	Kab. Minahasa Tenggara	KK	0	14.527.700	14.527.700
5	Kota Bitung	KK	0	12.746.400	12.746.400
6	Kota Manado	KK	0	10.434.235	10.434.235
			0	300.800	300.800
<b>XXIII</b>	<b>Gorontalo</b>				
1	Kab. Bone Bolango	KP, KK	0	379.114.970	379.114.970
2	Kab. Gorontalo	KP, KK	0	254.622.800	254.622.800
3	Kab. Pohuwato	KP, KK	0	49.399.870	49.399.870
4	Kab. Gorontalo Utara	KP	0	37.548.300	37.548.300
5	Kab. Boalemo	KP	0	32.644.000	32.644.000
			0	4.900.000	4.900.000
<b>XXIV</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>				
1	Kab. Banggai	KP	3.053.776.646	1.459.226.070	4.513.002.716
2	Kab. Morowali	KP, KK	3.053.776.646	200.306.500	3.254.083.146
3	Kab. Pangi Moutong	KP, KK	0	869.983.900	869.983.900
4	Kota Palu	KK	0	149.265.600	149.265.600
5	Kab. Donggala	KP, KK	0	75.633.810	75.633.810
6	Kab. Toli-Toli	KP, KK	0	67.483.700	67.483.700
7	Kab. Buol	KP, KK	0	57.851.980	57.851.980
8	Kab. Poso	KP	0	27.612.400	27.612.400
9	Kab. Tojo Una-Una	KP	0	7.128.180	7.128.180
			0	3.960.000	3.960.000
<b>XXV</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>				
1	Kab. Luwu Timur	KP, KK	112.229.315.000	2.433.987.240	114.663.302.240
2	Kab. Luwu	KP, KK	112.229.315.000	1.644.130.480	113.873.445.480
3	Kab. Luwu Utara	KP, KK	0	351.257.400	351.257.400
4	Kab. Sidenreng Rappang	KP, KK	0	195.294.200	195.294.200
5	Kab. Enrekang	KP, KK	0	125.067.000	125.067.000
6	Kota Palopo	KP	0	46.032.640	46.032.640
7	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	KP	0	3.699.200	3.699.200
8	Kab. Takalar	KP	0	25.162.000	25.162.000
9	Kab. Sinjai	KP	0	11.466.220	11.466.220
10	Kab. Jenepono	KP	0	10.146.000	10.146.000
11	Kab. Wajo	KK	0	8.970.000	8.970.000
12	Kab. Barru	KP	0	8.751.400	8.751.400
13	Kab. Bone	KP	0	2.473.800	2.473.800
			0	1.536.900	1.536.900
<b>XXVI</b>	<b>Sulawesi Barat</b>				
1	Kab. Mamuju	KP	0	31.900.000	31.900.000
			0	31.900.000	31.900.000



No.	Propinsi/Kab/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXVII	<b>Sulawesi Tenggara</b>				
1	Kab. Kolaka	KP, KK	34.125.954.037	3.331.375.949	37.457.329.986
2	Kab. Bombana	KP, KK	21.147.403.276	597.701.600	21.745.104.876
3	Kab. Buton	KP	7.634.441.620	119.573.000	7.754.014.620
4	Kab. Konawe	KP, KK	5.344.109.140	305.499.980	5.649.609.120
5	Kab. Konawe Selatan	KP, KK	0	1.746.214.124	1.746.214.124
6	Kab. Kolaka Utara	KP, KK	0	250.564.085	250.564.085
7	Kab. Buton Utara	KP	0	245.344.900	245.344.900
8	Kab. Konawe Utara	KP	0	51.292.260	51.292.260
			0	15.186.000	15.186.000
XXVIII	<b>Maluku</b>		0	12.412.250	12.412.250
1	Kab. Maluku Tenggara	KP	0	4.750.000	4.750.000
2	Kab. Maluku Tengah	KP	0	4.373.250	4.373.250
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	KP	0	3.289.000	3.289.000
XXIX	<b>Maluku Utara</b>		213.394.308.236	2.653.786.100	216.038.094.336
1	Kab. Halmahera Timur	KP	179.860.082.731	1.070.342.700	180.930.425.431
2	Kab. Halmahera Utara	KP, KK	22.072.563.000	931.809.400	23.004.372.400
3	Kab. Halmahera Tengah	KP, KK	8.397.885.805	478.917.050	8.876.802.855
4	Kab. Halmahera Selatan	KP	3.053.776.700	135.780.950	3.189.557.650
5	Kab. Kepulauan Sula	KP	0	32.000.000	32.000.000
6	Kab. Halmahera Barat	KP	0	4.936.000	4.936.000
XXX	<b>P a p u a</b>		1.720.576.000.000	4.795.340.100	1.725.371.340.100
1	Kab. Mimika	KP, KK	1.720.576.000.000	924.373.250	1.721.500.373.250
2	Kab. Paniai	KP, KK	0	856.123.800	856.123.800
3	Kab. Nabire	KP, KK	0	845.607.000	845.607.000
4	Kab. Sarmi	KP, KK	0	816.915.300	816.915.300
5	Kab. Keerom	KP, KK	0	468.245.000	468.245.000
6	Kab. Tolikara	KK	0	205.719.000	205.719.000
7	Kab. Jayawijaya	KP, KK	0	169.640.500	169.640.500
8	Kab. Puncak Jaya	KK	0	156.486.500	156.486.500
9	Kab. Pegunungan Bintang	KK	0	142.175.000	142.175.000
10	Kab. Waropen	KP, KK	0	119.005.000	119.005.000
11	Kab. Jayapura	KP	0	78.557.250	78.557.250
12	Kab. Kepulauan Yapen	KP	0	12.492.500	12.492.500
XXXI	<b>Papua Barat</b>		7.634.142.380	447.109.200	8.081.251.580
1	Kab. Kaimana	KK	0	109.414.200	109.414.200
2	Kab. Raja Ampat	KP, KK	7.634.142.380	337.695.000	7.971.837.380
	<b>Jumlah</b>		<b>8.659.018.483.000</b>	<b>84.432.993.995</b>	<b>8.743.419.576.995</b>

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2498 K/84/MEM/2008  
 TANGGAL : 30 Oktober 2008

DAERAH PENGHASIL DAN  
 DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI  
 UNTUK TAHUN 2009

NO.	WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	(RIBU BAREL)	
A.	0 - 4 MIL LAUT I NAD		303.519.94	
		1 Aceh Timur	2.791.41	
		2. Aceh Utara	442.64	
			3. Aceh Tamiang	1.620.60
		II Sumatera Utara		728.18
			4. Langkat	401.50
			5. Binjai	365.00
			6. Deli Serdang	34.31
				2.19
		III. Riau		
			7. Bengkalis	152.826.60
			8. Indragiri Hulu	80.667.43
			9. Kampar	697.07
			10. Rokan Hulu	16.024.26
			11. Rokan Hilir	416.83
			12. Siak	24.881.86
			13. Palalawan	29.645.22
				493.92
		IV KEP. Riau		20.596.95
			14. Natuna	20.596.95
		V Jambi		
			15. Batang Hari	10.145.18
			16. Muaro Jambi	253.68
			17. Kota Jambi	1.110.33
			18. Tanjung Jabung Timur	616.12
			19. Tanjung Jabung Barat	1.390.60
			20. Sarolangun	5.551.70
			21. Tebo	967.25
				255.50
		VI. Sumatera Selatan		29.914.31
			22. Lahat	545.38
			23. Muara Enim	7.425.04
			24. Kota Prabumulih	1.933.41
			25. Musi Banyuasin	14.083.63
			26. Banyuasin	1.146.76
			27. Musi Rawas	2.759.45
		28. Ogan Ilir	485.82	
		29. Ogan Komering Ulu	1.484.82	
	VII. Lampung		2.684.60	
		30. Lampung Timur		
	VIII. DKI Jakarta		2.611.43	
		31. DKI Jakarta		
	IX. Jawa-Barat		8.995.39	
		32. Indramayu	1.790.92	
		33. Karawang	963.04	
		34. Majalengka	66.43	
		35. Subang	252.58	
		36. Bekasi	5.902.42	

NO.	WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	(RIBU BAREL)
X.	Jawa-Tengah	37. Biora	302.22 302.22
XI.	Jawa-Timur	38. Bojonegoro 39. Bangkalan 40. Sumenep 41. Tuban 42. Sidoarjo 43. Gresik	26.043.85 17.675.02 240.90 3.322.06 1.338.82 10.95 3.456.11
XII.	Kalimantan-Selatan	44. Tabalong 45. Balangan	1.927.93 1.664.04 263.90
XIII.	Kalimantan-Timur	46. Bulungan 47. Nunukan 48. Kota Tarakan 49. Kota Samarinda 50. Kutai Kertanegara 51. Kutai Timur 52. Panajam Paser Utara 53. Kota Bontang 54. Tanah Tidung	33.620.26 713.94 766.50 639.12 193.40 29.526.76 707.37 903.01 161.04 9.13
XIV.	Sulawesi Tengah	55. Morowali	908.49
XV.	Maluku	56. Seram Bagian Timur	3.580.61
XVI.	Papua Barat	57. Teluk Bintuni 58. Srorong 59. Raja Ampat	6.169.23 1.484.82 3.604.01 1.080.40
B.	4 - 12 MIL LAUT	1. Lampung 2. Bangka Belitung 3. Jawa-Barat 4. Kalimantan-Timur 5. Kep. Riau 6. Jawa Timur	28.443.14 5.624.49 689.28 3.843.24 13.831.57 841.31 3.813.25
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	18.436.88


  
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Sekretaris Jenderal  
 WARYONO KARNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2498 K/B4/HEM/2008  
 TANGGAL : 30 Oktober 2008

DAERAH PENGHASIL DAN  
 DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL GAS BUMI  
 UNTUK TAHUN 2009

NO.	WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	(RIBU MMBTU)
A.	0 - 4 MIL LAUT		2.033.966.50
I.	NAD		40.080.32
		1. Aceh Timur	383.53
		2. Aceh Utara	39.696.79
II.	Sumatera Utara		20.853.97
		3. Langkat	16.371.61
		4. Binjai	1.244.50
		5. Deli Serdang	3.237.86
III.	Riau		10.557.00
		6. Kota Pekanbaru	9.978.89
		7. Palalawan	570.11
IV.	KEP. Riau		146.607.14
		8. Natuna	146.607.14
V.	Jambi		75.974.14
		9. Batang Hari	3.219.34
		10. Tanjung Jabung Timur	15.958.61
		11. Tanjung Jabung Barat	56.796.19
VI.	Sumatera Selatan		522.283.88
		12. Lahat	16.644.95
		13. Muara Enim	104.464.59
		14. Kota Prabumulih	3.530.83
		15. Musi Banyuasin	271.527.01
		16. Musi rawas	118.948.26
		17. Ogan Komering Ulu	7.168.25
VII.	DKI Jakarta	18. DKI Jakarta	26.706.00
VIII.	Jawa-Barat		177.954.43
		19. Indramayu	17.823.57
		20. Karawang	64.152.38
		21. Majalengka	1.038.41
		22. Subang	83.819.85
		23. Bekasi	11.120.22
IX.	Jawa-Timur		56.181.70
		24. Sumenep	8.088.21
		25. Sidoarjo	964.76
		26. Gresik	36.500.70
		27. Bangkalan	2.546.95
		28. Bojonegoro	8.081.08
X.	Jawa-Tengah		730.00
		29. Kota Semarang	730.00

NO.	WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	(RIBU MMBTU)
X.	Kalimantan-Timur	30. Kota Tarakan	636.042.06
		31. Kota Samarinda	5 714 98
		32. Kutai Kertanegara	8.220 85
		33. Panajam Paser Utara	620 026 07
		34. Kota Bontang	758 75
XI.	Sulawesi-Selatan	35. Wajo	1 321 42
			10.255.00
XII.	Papua Barat	36. Kab. Sorong	309.740.35
		37. Teluk Bintuni	331.85
			309.409.00
B.	4 - 12 MIL LAUT	1. Jawa-Barat	492.512.50
		2. Kalimantan-Timur	31.702 86
		3. Kep. Riau	359 984.21
		4. Jawa Timur	42 474 00
			58 351 43
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	220.628.06

3.11. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL



WARYONO KARNO